

EFEKTIFITAS KERJASAMA PENELITIAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LUMAJANG

Muhammad Naufal Agrasane Triyono¹, Itok Wicaksono²,

^{1,2} Department of Government Science, Universitas Muhammadiyah Jember, East Java - Indonesia

Corresponding author: Muhammad Naufal Agrasane Triyono (agrasane@gmail.com)

Article Information: submission received: 26 September 2024; revision: 18 October 2024; accepted 24 November 2024; first published online 26 November 2024

Abstract

Regional development is a complex effort that requires synergy among various related parties, including local governments and cooperation partners. Partners in regional development planning play a crucial role in achieving sustainable and effective development goals. In this context, the effectiveness of cooperation partners is the key to ensuring that existing resources and potential can be optimally utilized. The importance of collaboration between local governments and cooperation partners extends beyond financial aspects, involving the exchange of knowledge, technology, and experience. In this era of globalization, where development challenges are increasingly complex, the involvement of cooperation partners is essential to enhance regional capacity and competitiveness. The effectiveness of these partners is also relevant to the participatory concept in regional development planning. By engaging various stakeholders, including the private sector, civil society, and academic institutions, development planning can become more holistic and responsive to the diverse needs and aspirations of the community. Research partners are institutions or individuals that collaborate in implementing research activities. This type of collaboration can involve various sectors, including educational institutions, government, industry, and non-profit organizations. This research utilizes qualitative data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The data sources in this study consist of primary and secondary data, with primary data obtained from interviews and observations of the Lumajang district government, as well as secondary data sourced from books and journals relevant to the research conducted.

Keywords: Effectiveness of Cooperation, Regional Development Planning

1. INTRODUCTION

Pembangunan daerah adalah sebuah proses yang rumit dan membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan mitra kerjasama. Mitra kerjasama dalam perencanaan pembangunan memegang peran penting untuk mencapai

pembangunan yang berkelanjutan dan efisien. Efektivitas kemitraan ini menjadi kunci untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada secara optimal.

Kerjasama antara pemerintah daerah dan mitra tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman. Di era globalisasi yang penuh tantangan ini, keterlibatan mitra kerjasama sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah. Efektivitas mitra kerjasama juga mendukung pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, dengan melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, sehingga perencanaan menjadi lebih menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mitra kerjasama dalam penelitian, seperti lembaga atau individu, terlibat dalam kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan dampak positif. Kolaborasi ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintah, industri, dan organisasi nirlaba.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan langkah-langkah yang melibatkan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya demi kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Pembangunan wilayah atau negara adalah proses yang kompleks, sehingga perencanaan matang sangat diperlukan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Dalam penelitian Syaron Brigitte Lataenda dari Universitas Sam Ratulangi dengan judul Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda di Kota Tomohon masih dinilai cukup baik, meski belum optimal. Berdasarkan tanggapan responden, 38% menilai fungsinya cukup baik, 33% menilai baik, dan 29% merasa kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda masih menghadapi berbagai kendala, sehingga evaluasi terus menerus diperlukan untuk perbaikan.

Efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dalam waktu yang ditentukan. Atmosoeparto (2002:139) menjelaskan bahwa efektivitas berarti melakukan hal yang tepat, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal dengan cara yang benar. Dengan kata lain, efektivitas mengukur sejauh mana sasaran tercapai, sedangkan efisiensi menilai bagaimana sumber daya digunakan secara bijak.

Pembangunan daerah adalah proses yang kompleks yang membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan mitra kerja. Mitra kerjasama memainkan peran penting dalam memastikan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif tercapai. Albert Waterson mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses memilih dari berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan, sambil memantau pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Indonesia sebagai negara hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, di mana hukum mencakup berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Pasal 18 UUD 1945 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Riyadi & Bratakusumah (2004:8) menekankan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai perencana, mendesain dan membentuk interaksi untuk mencapai tujuan, dan harus melaksanakan fungsi serta tugas pokoknya sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan..

2. LITERATURE REVIEW

Definitions of listening comprehension vary among scholars. Brown and Yule (1983) describe it as the ability to comprehend what has been heard, while Rost (2002) defines it as an interactive process in which listeners are involved in creating meaning.

There are two process of listening, namely bottom up and to down processing. Bottom up processing is a process of listening comprehension in which the listener begins by analyzing the incoming input as successive levels of organization of sounds, words, clauses, sentences, and text until those linguistic clues derive the meaning or the understanding (Richard, 2008:4) Top-down processing refers to the listeners use of background knowledge such as previous knowledge of the topic, situational or contextual clues, schemata or scripts to gain the understanding or the message on listening comprehension process (Richard, 2008). Listeners apply stored knowledge to anticipate, interpret, and integrate new information. Effective listening comprehension relies on a flexible combination of both processing methods, integrating background knowledge with language input for deeper understanding.

There are two levels of listening comprehension. First is literal comprehension. It is the understanding of information and facts stated in text. The listeners are required to be able to retell or recall the facts or information presented in speakers' utterance. It includes the ability to identify main ideas, supporting details, and the relationships among ideas (Brasell 2008:17). The second is inferential comprehension. This requires listener to draw conclusions and predictions based on information not explicit stated in passage (Brasell 2008:17).

The studies about the effect of visual aid on listening comprehension were conducted. Harmer (2007) emphasized that understanding and engaging with spoken input are crucial for language activation, while Richards (2008) highlighted the importance of awareness in learning from what we hear. Effective listening comprehension depends on both listener attention and the clarity of the input. Danxin Liang (2013) explored how bottom-up and top-down processing, along with prior knowledge, influence

comprehension. His study found that visual stimuli can enhance comprehension by activating background knowledge. Chen Chan, Wang Lei, and Xu Lena (2014) supported this, noting that well-designed multimedia, especially videos, improves listening comprehension. Putri Ananda (2019) also found videos more effective than audio alone for English students, provided the material is familiar and visual clues are well-integrated. Tan Shaojie, Arshad Abd Samad, and Lilliati Ismail (2022) further showed that visual input improves comprehension when it aligns with auditory information, but mismatched visuals can create cognitive overload and distract students (Kirschner et al., 2018).

Despite these findings, few studies have explored the impact of animated videos on listening comprehension. Therefore, study aims to investigate how animated videos influence listening skills. The following hypothesis states: There is significant effects of using visual aid on students' listening comprehension.

3. METHOD

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:194), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, atau ketika peneliti ingin menggali informasi lebih mendalam dari responden. Esterberg (Sugiyono, 2016) juga mendukung hal ini.

b. Observasi

Morissan (2017:143) menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan sehari-hari yang melibatkan penggunaan pancaindra. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan individu untuk mengamati dan menilai melalui penggunaan pancaindra mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan, mengorganisir, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk dokumen. Dokumentasi digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis, untuk memastikan informasi tersedia dan mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.

4. RESULTS and DISCUSSION

a. Results

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diperbarui setiap lima tahun sekali. RPJMD ini menjadi pedoman utama bagi setiap kerjasama yang dijalin, dengan fokus pada upaya mencapai target-target pembangunan daerah yang telah direncanakan. Setiap pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang harus mendapatkan persetujuan dari

pimpinan daerah, khususnya Bupati, sehingga ada jaminan bahwa kerjasama tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh daerah.

Kerjasama yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Lumajang dan para mitra tidak terbatas pada aspek finansial saja, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pertukaran sumber daya, seperti pengetahuan, teknologi, dan pengalaman. Salah satu informan menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang aktif dalam melakukan koordinasi dengan mitra-mitra kerjasama di berbagai sektor, baik dari kalangan akademisi, industri, maupun organisasi nirlaba. Setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk saran, masukan teknis, maupun sumber daya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Adapun koordinasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan mitra kerjasama mencakup beberapa bidang, di antaranya:

- a. **Aspek Keuangan:** Mitra kerjasama, terutama dari sektor swasta, turut memberikan kontribusi finansial yang mendukung implementasi berbagai program pembangunan. Selain itu, mitra dari sektor akademik juga membantu pemerintah dalam menyusun strategi alokasi anggaran yang efisien berdasarkan hasil kajian dan penelitian.
- b. **Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):** Dalam konteks ini, beberapa universitas dan lembaga pendidikan tinggi berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pegawai dalam menjalankan program-program pembangunan daerah. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga penelitian juga menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan strategis.
- c. **Pengembangan Teknologi dan Inovasi:** Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah Kabupaten Lumajang juga menjalin kerjasama dengan beberapa institusi penelitian dan pengembangan teknologi. Melalui kerjasama ini, teknologi yang lebih maju diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, lingkungan, dan infrastruktur. Inovasi yang dihasilkan dari kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa salah satu kunci keberhasilan kerjasama tersebut adalah keterlibatan aktif dari seluruh pihak dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Informan menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif, di mana seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait prioritas pembangunan. Dengan pendekatan ini, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dengan baik, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Terkait dengan Efektivitas Kerjasama, dalam penelitian ini efektivitas tersebut diukur melalui beberapa indikator, di antaranya:

- a. **Pencapaian Target Pembangunan:** Beberapa kerjasama yang terjalin berhasil mencapai target-target pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian, dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Mitra kerjasama juga memberikan masukan strategis yang relevan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang muncul selama implementasi.
- b. **Daya Saing Daerah:** Adanya kolaborasi dengan mitra-mitra berkompeten telah mendorong peningkatan daya saing Kabupaten Lumajang di tingkat regional. Penggunaan teknologi baru dan praktik-praktik terbaik yang dibawa oleh mitra dari sektor swasta dan akademis telah membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi daerah, terutama dalam hal produktivitas dan pengelolaan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan berbagai mitra telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target-target pembangunan, tetapi juga meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di era globalisasi.

5. CONCLUSION

Penelitian ini juga menemukan beberapa hal di luar batasan penelitian yang awalnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan kerjasama. Kerjasama di Kabupaten Lumajang menunjukkan hasil yang efektif, baik bagi pemerintah daerah maupun mitra kerjasama. Kerjasama ini membantu mengurangi anggaran dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dengan lebih efisien. Kesimpulannya, kerjasama yang telah dilaksanakan menghasilkan jam kerja yang lebih efektif dan efisien, didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

References

- Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015).
- Kerjasama penelitian dalam Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, <https://www.its.ac.id/drpm/id/program-kegiatan/program-pendukung/kerjasamapenelitian/>
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 6(1), 56-70.
- Kuncoro, M. Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi. Perencanaan, Strategi Dan Peluang, Erlangga, Jakarta, 2005, hal. 10

-
- Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Maisun, S. S. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 93-101.
- Pasal 1 ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.
- Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).Unsurnya, UI Press, Jakarta, hlm. 23.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Syamsi, Ibnu. 2007. Efisiensi Sistem, dan Prosedur Kerja. Jakarta: BumiAksara. Thoha, Miftah. 2005. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erwan dan Dyah. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Sugiyono. (2015). Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.